DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Astawa, *Eksistensi MK di antara Kelembagaan Negara dalam Perspektif Hukum Tata negara*, 2004.

Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta, Bee Media 2007.

Harjono, *Kedudukan dan Kewenangan MK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta, 2002.

H.M. Laica Marzuki, *Berjalan – jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta, 2006.

Jimmly Assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tatanegara, UI, 2012.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi, Beberapa Faktor yang Mempengaruhi,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, 2009.

Lep Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Jakarta, 2005.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat).* Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang – Undang*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara yang Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1982.

Patrialis Akbar, *Lembaga – Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013.

Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Razali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, rajawali pers, jakarta, 2007.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Cita Bhakti Akademika, Bandung.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1968.

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Data Perundang – Undangan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menajdi Undang-Undang.

Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10 uu No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18Ayat (2) huruf b dan Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.120/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Data Elektronik

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/03/27/23596/43/25/Mantan-Narapidana-Bisa-Ikut-Pilkada diakses pada 20 September, pukul 00:28

http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/ diakses pada tanggal 25 September, pukul 01:47

Mahfud MD, *MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada*, pada http://nasional.kompas.com/MK.Anulir.Larangan.Mantan.Narapidana.Ikut.Pilkada diakses pada tanggal 20 September, pukul 00:05.

Mahfud MD, *Sayangkan MK bolehkan Mantan Napi Maju di Pilkada*, pada http://news.detik.com/berita/2979109/mahfud-md-sayangkan-mk-bolehkan-mantan-napi-maju-di-pilkada di akses tanggal 20 September, jam 00:21